

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk usaha skala kecil ataupun usaha dalam skala besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia terutama dari golongan menengah kebawah. Yang tergolong juga masih memiliki modal yang tidak terlalu besar. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi wadah yang baik bagi pencipta lapangan pekerjaan sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. UMKM harus didukung agar tetap eksis, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik. Disamping itu kegiatan UMKM tidak terlepas dari aktivitas akuntansi, seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi saat ini penerapan akuntansi sudah banyak digunakan pada sektor usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diperlihatkan kepada pihak-pihak terkait bahwa suatu usaha layak dijalankan, penerapan akuntansi sangat penting untuk keberlangsungan usaha dimana nantinya keputusan ekonomi yang baik akan mempengaruhi kelayakan usaha di masa depan.

Untuk mengevaluasi kelayakan pada suatu usaha, hendaklah mengetahui keadaan keuangan usaha tersebut. Sedangkan itu kondisi keuangan akan dapat diketahui dari laporan keuangan yang ada pada usaha yang sedang dijalankan tersebut

Laporan keuangan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan usaha, laporan keuangan digunakan sebagai sajian informasi keuangan untuk pihak eksternal maupun internal kegiatan usaha tersebut, bagi pihak eksternal, laporan keuangan digunakan bagi pihak manajemen dan pemilik usaha untuk mengetahui posisi keuangannya sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangannya. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangannya sebagai bahan analisis dalam pemberian kredit oleh kreditur ataupun investor

Berbanding terbalik dengan penting adanya penerapan akuntansi, sering sekali ditemui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih memiliki kendala dan tantangan mengenai pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan banar, hal ini disebabkan pemilik usaha tidak memiliki pengetahuan akuntansi, serta menganggap bahwa akuntansi sulit untuk di diterapkan karena minimnya pengetahuan terhadap akuntansi tersebut. Dan beranggapan bahwa pencatatan akuntansi dan pembukuan bagi keberlangsungan usahanya tidaklah begitu penting dalam usaha yang sedang dijalankan, kebanyakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya mencatat jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Meskipun demikian pencatatan tersebut hanya pencatatan sederhana yang kegunaanya sebagai pengingat dan belum

menggunakan format pencatatan yang benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Menyadari kondisi yang ada saat ini, maka diperlukan adanya pembaharuan pada laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dan telah disetujui Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 dan efektif berlaku pada 1 Januari 2018. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK EMKM memiliki tujuan untuk menerapkan laporan keuangan UMKM dan menjawab fenomena bahwa tidak semua UMKM dapat melaksanakan standar keuangan yang sebelumnya telah ada yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Kehadiran SAK EMKM diharapkan mampu mempermudah UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha yang jalankan sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangannya, sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan

Namun keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) belum banyak diketahui oleh pemilik usaha mikro,

kecil, dan menengah serta kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama kurang dikenalnya penggunaan SAK EMKM pada lingkungan UMKM.

Hermi Sularsih dan Amar Sobir (2019) dalam penelitiannya yang dilakukan dengan judul Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa UMKM yang diteliti tidak menerapkan SAK EMKM, pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Penelitian Diadjeng Amatullah Azizah Rachmati (2019) dengan judul Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan pada UMKM Batik Jumput Dahlia, belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk UMKM, hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat seluruh aset yang dimiliki.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jilma Dewi Ayu Ningtyas (2017) dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan) Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum terdapat adanya laporan keuangan yang dilakukan pada UMKM Bintang Malam yang sesuai dengan SAK EMKM, dimana peneliti berperan menyusun bagaimana sebaiknya laporan keuangan yang benar sesuai SAK EMKM,

kemudian peneliti juga menemukan keterbatasan bahwa belum adanya Beban pajak, sehingga nilai laba bersihnya masih sebelum dikurangi pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa setiap sektor usaha harus memiliki catatan akuntansi sebagai bentuk laporan keuangan yang akurat dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya SAK EMKM yang terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk menilai sejauh mana pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan maka berangkat dari keinginan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO , KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM) PADA UD SIANTAR NUBIAN PEMATANG SIANTAR.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah penerapan akuntansi yang dilakukan UD Siantar Nubian Pematang Siantar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dari segi Neraca, Laba Rugi, dan CALK ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: Untuk melihat sejauh mana kesesuaian penerapan akuntansi yang dilaksanakan oleh UD Siantar Nubian Pematang Siantar menurut SAK-UMKM dari segi Neraca, Laba Rugi, dan CALK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi penulis, Sebagai tambahan pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan SAK EMKM untuk UMKM dan juga menggunakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama ini agar menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.
- 2) Manfaat bagi Objek yang diteliti, Sebagai kontribusi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan menjadi sumber masukan bagi pemilik usaha dalam memahami dan menerapkan SAK EMKM pada usahanya dimasa yang akan datang.
- 3) Bagi peneliti berikutnya, Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM juga adalah salah satu pilar utama nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai bukti keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Abdul Halim:

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil , dan Usaha Menengah (UM) umunya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.¹

¹ Abdul Halim, **Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju**, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2020

Di Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- 1. Usaha Mikro**
- 2. Usaha Kecil**
- 3. Usaha Menengah²**

Berikut penjelasan dari definisi UMKM yang di atur berdasarkan PP No 7 Tahun 2021:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.

Kriteria Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yang diatur dalam Peraturan pemerintah No 7 Tahun 2021 pasal 35 dikelompokkan berdasarkan kriteria modal

² PP No 7 Tahun 2021 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/154506> diunduh tanggal 4 April 2022

usaha atau hasil penjualan tahunan. Kreteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Kreteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.1
Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Aset dan Omset

No	Kreteria Usaha	Modal	Penjualan
1	Usaha Mikro	Maks 1 miliar	Maks 2 miliar
2	Usaha Kecil	>1 miliar–5 miliar	>2 miliar -15 Miliar
3	Usaha Menengah	>5 miliar-10 miliar	>15 Miliar-50 Miliar

Sumber : PP No 7 Tahun 2021 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/154506>

Kriteria sebagaimana dimaksud pada tabel diatas bahwa nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

2.1.2 Karakterstik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi pembeda antara pelaku usaha dengan skala usahanya.

Tabel 2. 2
Karakteristik Umkm

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, selalu berpindah tempat c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha e. SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai f. Tingkat pendidikan rata-rata rendah g. Umumnya belum adanya akses kepada perbankan,

	namun sebagian sudah akses lembaga nonbank h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi walaupun masih sederhana d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga e. Sudah membuat neraca usaha f. SDM memiliki pengalaman dalam berwirausaha g. Sebagian sudah akses perbankan dalam keperluan modal h. Sebagian masih belum memiliki manajemen usaha yang baik
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi b. Telah menerapkan manajemen keuangan dengan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan dalam auditing ataupun penilaian serta pemeriksaan termasuk oleh perbankan c. Sudah memiliki akses kepada sumber pendanaan perbankan. d. Memiliki SDM yang sudah terlatih dan terdidik

Sumber: UMKM (usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk Usaha-Usaha

2.1.3 Asas dan Tujuan UMKM

a. Asas UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai wadah bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang dirancang sedemikian rupa sehingga jati diri wadah ini perlu disadari oleh setiap insan yang terkait dengan UMKM. Untuk itu dalam Undang-Undang UMKM dicantumkan sejumlah asas. Pasal 2 UU UMKM dijelaskan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan;

1. **Keluargaan**
2. **Demokrasi ekonomi**
3. **Kebersamaan**

4. Efisiensi berkeadilan
5. Berwawasan lingkungan
6. Kemandirian
7. Keseimbangan kemajuan
8. Kesatuan ekonomi nasional ³

Berikut merupakan Penejelasan Asas – asas pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

1. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keberadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3. Asas kebersamaan

³ Lathifah Hanim dan Ms Noorman, **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk- Bentuk Usaha**, Cetakan Pertama : Unissula Press, Semarang, 2018, hal.24

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi keberadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Asas berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6. Asas berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga, mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

8. Asas keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan adalah asas peberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Asas kesatuan ekonomi nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

b. Tujuan Adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang cukup populer di Indonesia, dimana bidang usaha ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia mulai dari skala kecil hingga skala besar. Serta adanya pemberdayaan atau dukungan pemerintah terhadap masyarakat untuk melakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan:

1. Mewujudkan Struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat dijalankan dengan baik menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah karya yang bermanfaat dalam bidang usaha

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Output dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan merupakan media penyampaian informasi bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap oprasi perusahaan (investor, bank, pemasok, dsb). Oleh karena itu laporan keuangan harus disajikan sedemikian rupa agar dapat membantu memenuhi kegunaannya secara efektif untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ardin Dalok Saribu menjelaskan **“laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang besumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun atau tahun bejalan”**.⁴

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk menginformasikan mengenai bagaimana keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh pihak internal atau manajemen dan pemilik usaha untu mengetahui posisi keuangannya sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangannya sebagai bahan analisis dalam pemberian kredit oleh kreditur ataupun investor.

⁴ Ardin Dolok Saribu, dan Bonifasius H. Tambunan, **Akuntansi Keuangan Menengah I Intetermediate Accounting**, Buku Satu, Edisi pertama :LPPM UHN PRESS, Medan, 2021, hal.12

2.2.2 Tujuan Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi.

Fahmi menjelaskan Bahwa:

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja laporan keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan⁵.

Walaupun suatu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.

⁵ Riswan dan Yolanda Fatrecia Kesuma, **Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja keuangan PT Budi Satria Wahana Motor**, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2014

4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.2.3 Pihak Yang Membutuhkan Informasi Keuangan

Berikut adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan:

1. Investor: Investor berkepentingan dengan risiko serta return dari investasi mereka. Investor memerlukan informasi tersebut untuk menentukan apakah mereka harus membeli, menahan, atau menjual investasinya. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden.
2. Karyawan: Selain informasi mengenai stabilitas entitas untuk menghasilkan laba, para karyawan dan serikat pekerja juga memerlukan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, pension, dan peluang kerja.

3. Pemberi pinjaman: Pemberi pinjaman memerlukan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai apakah uang yang mereka pinjamkan serta bunganya dapat bayar pada saat jatuh tempo
4. Pelanggan: Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka memiliki perjanjian jangka panjang dengan entitas atau bergantung pada entitas (misalnya, bergantung pasokan produk tertentu dari entitas).
5. Pemasok: Pemasok tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai apakah jumlah nilai yang terutang dapat dibayar pada saat jatuh tempo
6. Pemerintah: Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berada dibawahnya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas. Pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Publik: merupakan entitas bisnis yang mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Contohnya: publik memiliki kontribusi substantial kedalam perekonomian negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan memanfaatkan pemasok lokal.

Kepentingan dan tujuan penggunaan informasi keuangan oleh para *stakeholders* tidak selalu sama, terkadang dapat berlawanan. Sebagai contoh pemegang saham sebagai investor sangat berkepentingan atas laba usaha, misalnya adalah deviden yang akan dibagikan dan kenaikan nilai saham, dari

pihak kreditur terkait solvabilitas dan likuiditas perusahaan, terkait kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya (baik pokok maupun bunga) ketika jatuh tempo, bagi manajemen dan karyawan sangat berkepentingan atas pemberian gaji, bonus dan komponsasi lain yang merupakan beban biaya yang akan mengurangi laba usaha.

Mengingat *stakeholder*, waktu dan tempat penggunaan laporan keuangan sangat bervariasi, agar laporan keuangan tidak mementingkan salah satu pihak dan agar tidak menyesatkan bagi pengguna informasi, maka laporan keuangan yang akan disusun harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan yang antara lain:

- a. Dapat dipahami**
- b. Relevan**
- c. Keandalan**
- d. Dapat dibandingkan**⁶

Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan:

- a. Dapat dipahami,
informasi dalam laporan keuangan dianggap berkualitas jika memiliki kemampuan kemudahan untuk dipahami pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia IAI, **Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik** : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Jakarta, 2019, hal.6

- b. Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Kualitas informasi harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu.
- c. Keandalan, informasi memiliki kualitas andal (*reliable*) apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- d. Dapat dibandingkan, pemakai dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut IAI dalam SAK EMKM, 2016:

Entitas Mikro, Kecil dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut⁷

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada akhir tahun 2016 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2018, SAK EMKM merupakan

⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)* : Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 2016, hal.1

standar keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. SAK EMKM secara jelas mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh sebab itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, pemilik usaha harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha.

Jika dibandingkan dengan SAK ETAP yang juga digunakan pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, SAK EMKM merupakan Standar Keuangan yang lebih sederhana, dan dirancang khusus untuk entitas usaha kecil. Berbeda dengan SAK ETAP yang diperuntukan pada usaha yang cukup besar namun belum memiliki entitas publik signifikan. Dengan adanya penyesuaian dari kebijakan menggunakan SAK ETAP menjadi SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat lebih mudah menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak perbankan.

Jika standar ini tidak diterbitkan maka pelaku UMKM harus mengikuti SAK berbasis IFRS (SAK UMUM) yang dimana SAK IFRS ini biasanya digunakan oleh perusahaan *go Public* atau terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, SAK IFRS merupakan SAK yang lebih kompleks dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga pelaku UMKM akan sulit menerapkannya dan akan mengalami semakin banyak kendala dalam menyusun laporan keuangannya.

2.4 Perlakuan Akuntansi SAK EMKM Pada UMKM

a. Laporan Keuangan SAK EMKM

Menurut Syaiful Bahri **“laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan”**.⁸ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pihak manajemen.

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu

- a. Aset**
- b. Liabilitas**
- c. Ekuitas⁹**

Berikut penjelasan atas informasi posisi keuangan suatu entitas:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dari manfaat ekonomi dimasa yang akan datang diharapkan akan diperoleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

⁸ Syaiful Bahri, **Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS** : Andi, Yogyakarta, 2016, hal. 143

⁹ Amir Hasan, Gusnardi, **Prospek Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018**, Cetakan 1 : SADARIPRESS, Bandung, 2018, hal.12

- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Sedangkan informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan

a. Penghasilan

b. Beban¹⁰

Berikut penjelasan dari informasi keuangan suatu entitas:

- a. Penghasilan (*Income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Beban (*Expense*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal

Pengakuan unsur laporan keuangan adalah suatu proses pembentukan pos-pos dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi yang memenuhi defenisi suatu unsur dan kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi yang terkait pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir kedalam atau keluar dari entitas
- b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

¹⁰ Ibid, Hal. 13

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mencapai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban didalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis.

penyajian wajar dalam laporan keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk suatu entitas dimana penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan defenisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi defenisi serta kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian kemampuan entitas atas kelangsungan usahanya dimasa depan. entitas menyusun laporan keuangannya berdasarkan konsep entitas binsic. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, harus dengan jelas dipisahkan dengan pemilik bisnis tersebut dengan entitas lainnya.

Menurut IAI dalam SAK EMKM laporan keuangan entitas meliputi:

- 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**
- 2. Laporan Laba Rugi**
- 3. Catatan Atas Laporan Keuangan**¹¹

Berikut adalah penjelasan laporan keuangan menurut dalam SAK EMKM menurut IAI:

¹¹ Op.Cit.,Hal.11-14

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan Posisi keuangan atau dikenal dengan nama lain sebagai neraca (*balance sheet*) dimana laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. IAI menjelaskan dalam SAK EMKM laporan posisi keuangan SAK EMKM mencakup pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Persediaan
- d) Aset tetap
- e) Utang usaha
- f) Ekuitas

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajiannya relevan untuk memenuhi posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Adapun format neraca tertera pada Gambar 2.1.

2. Laporan Laba Rugi selama periode

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi memasukan semua penghasilan dan beban yang diketahui dalam suatu periode. Informasi yang disajikan laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Beban pajak

Gambar 2.1
Format Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

LAPORAN KEANGGARAN ENTITAS (laporan)

ENTITAS LAMPINAN POSISI KEANGGARAN SI DESKRIKSIER ZAKIAN 2017			
ASSET	Contoh	2016	2017
Perusahaan/Entitas			
1. Aset			
Aset lancar	1	1000	1000
Aset tetap	2	2000	2000
Aset tidak berwujud	3	3000	3000
Aset keuangan	4	4000	4000
Aset lainnya	5	5000	5000
2. Liabilitas			
Liabilitas lancar	6	6000	6000
Liabilitas jangka panjang	7	7000	7000
Liabilitas lainnya	8	8000	8000
3. Ekuitas			
Ekuitas pemilik	9	9000	9000
Ekuitas lainnya	10	10000	10000
Ekuitas lainnya	11	11000	11000
Ekuitas lainnya	12	12000	12000
Ekuitas lainnya	13	13000	13000
Ekuitas lainnya	14	14000	14000
Ekuitas lainnya	15	15000	15000
Ekuitas lainnya	16	16000	16000
Ekuitas lainnya	17	17000	17000
Ekuitas lainnya	18	18000	18000
Ekuitas lainnya	19	19000	19000
Ekuitas lainnya	20	20000	20000
Ekuitas lainnya	21	21000	21000
Ekuitas lainnya	22	22000	22000
Ekuitas lainnya	23	23000	23000
Ekuitas lainnya	24	24000	24000
Ekuitas lainnya	25	25000	25000
Ekuitas lainnya	26	26000	26000
Ekuitas lainnya	27	27000	27000
Ekuitas lainnya	28	28000	28000
Ekuitas lainnya	29	29000	29000
Ekuitas lainnya	30	30000	30000
Ekuitas lainnya	31	31000	31000
Ekuitas lainnya	32	32000	32000
Ekuitas lainnya	33	33000	33000
Ekuitas lainnya	34	34000	34000
Ekuitas lainnya	35	35000	35000
Ekuitas lainnya	36	36000	36000
Ekuitas lainnya	37	37000	37000
Ekuitas lainnya	38	38000	38000
Ekuitas lainnya	39	39000	39000
Ekuitas lainnya	40	40000	40000
Ekuitas lainnya	41	41000	41000
Ekuitas lainnya	42	42000	42000
Ekuitas lainnya	43	43000	43000
Ekuitas lainnya	44	44000	44000
Ekuitas lainnya	45	45000	45000
Ekuitas lainnya	46	46000	46000
Ekuitas lainnya	47	47000	47000
Ekuitas lainnya	48	48000	48000
Ekuitas lainnya	49	49000	49000
Ekuitas lainnya	50	50000	50000

Sumber: http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf

Demikian penjelasan mengenai pos-pos yang mencakup laporan laba rugi

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan kegiatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa. Pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, return penjualan, dan lain-lain.

2. Beban

Beban biasanya di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

a. Beban usaha

Beban usaha adalah semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha. Umumnya pada perusahaan jasa, beban usaha dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu:

1. Beban pemasaran (*Marketing expense*)

Beban pemasaran mencakup keseluruhan beban-beban yang digunakan untuk menyelenggarakan pemasaran atau penjuwalann barang/jasa dan pengangkutan. Contoh beban pemasaran antara lain; Gaji, Ikla, beban perjalanan, beban angkut penjualan, beban lembur dan sebagainya.

2. Beban adminstrasi (*Administration expense*)

Beban administrasi mencakup beban-beban yang terjadi dalam menyelenggarakan pengarahannya, pengawasan, dan pelaksanaan tugas perusahaan. Contoh jenis beban ini antara lain; gaji pegawai, beban sewa, beban listrik, air dan telpon, beban perlengkapan, beban asuransi, beban rapat, dan beban pertemuan.

b. Beban pajak

Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak masa kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi pada suatu periode tertentu sebagai beban atau penghasilan.

Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua bentuk format yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk langsung (*single-step*)

Laporan laba rugi dengan bentuk langsung menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba atau rugi bersih.

Seluruh pendapatan maupun beban digabungkan dalam menjadi satu jumlah pendapatan dan beban.

b. Bentuk bertahap (*multiple-step*)

Laporan laba rugi dalam bentuk bertahap menekankan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih, dimana bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan bagian non operasi. Adapun format laporan Laba Rugi tertera pada Tabel 2.2.

3. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan pos-pos tertentu yang relevan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan tambahan informasi yang tidak disajikan dibagian laporan keuangan namun masih relevan. Catatan atas laporan keuangan memuat:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
3. Informasi tambahan dan rician akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Adapun hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tertera pada Gambar 2.3. Kemudian contoh laporan keuangan Entitas disajikan pada Gambar 2.4 sampai dengan Gambar 2.5.

Gambar 2.2
Format Laporan Laporan Laba Rugi

Sumber: http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf

Gambar 2.4
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (Lanjutan)

Kategori	Saldo Awal	Saldo Akhir
ASSET		
A. Aset Lancar		
Kas	1000	1000
Piutang Usaha	2000	2000
Stok	3000	3000
Aset Lancar Lainnya	4000	4000
B. Aset Tidak Lancar		
Tanah	5000	5000
Bangunan	6000	6000
Aset Tidak Lancar Lainnya	7000	7000
Total Aset Tidak Lancar	18000	18000
Total Aset	25000	25000
LIABILITAS		
A. Liabilitas Lancar		
Utang Usaha	1000	1000
Utang Lancar Lainnya	2000	2000
Total Liabilitas Lancar	3000	3000
B. Liabilitas Tidak Lancar		
Utang Tidak Lancar Lainnya	22000	22000
Total Liabilitas Tidak Lancar	22000	22000
Total Liabilitas	25000	25000

Sumber: http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf

Gambar 2.5
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (Lanjutan)

Kategori	Saldo Awal	Saldo Akhir
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional	1000	1000
Pendapatan Tidak Operasional	2000	2000
Total Pendapatan	3000	3000
PENGHASILAN		
Penghasilan Operasional	1000	1000
Penghasilan Tidak Operasional	2000	2000
Total Penghasilan	3000	3000
PENGHASILAN POKOK		
Penghasilan Pokok Operasional	1000	1000
Penghasilan Pokok Tidak Operasional	2000	2000
Total Penghasilan Pokok	3000	3000
PENGHASILAN LAIN-LAIN		
Penghasilan Lain-lain Operasional	0	0
Penghasilan Lain-lain Tidak Operasional	0	0
Total Penghasilan Lain-lain	0	0
Total Penghasilan	3000	3000

Sumber: http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf

2.5 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69: Agrikultur

2.5.1 Pengertian PSAK 69: Agrikultur

PSAK 69 tentang Agrikultur telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015, yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur yaitu aset biologis kecuali tanaman produktif.

Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen atas aset biologis oleh entitas untuk dijual atau di konversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup.¹²

2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 69 menjelaskan bahwa entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika:

- a. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat masa lalu.
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut mengalir ke entitas dan.
- c. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran nilai wajar aset

¹² Ikatan Akuntan Indonesia IAI, PSAK 69 : Agrikultur : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Jakarta, 2015, hal 3

biologis dapat dikurangi sesuai dengan atribut yang signifikan. Contohnya berdasarkan uisa atau kualitas.

2.5.3 Pengungkapan

Pada paragraf 42 PSAK 69: Agrikultur, menjelaskan bahwa dalam mengungkapkan aset biologis, entitas harus mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis, membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, atau antara aset biologis menghasilkan dan yang belum menghasilkan sesuai dengan keadaan aset biologis tersebut. Perbedaan ini memberikan informasi yang mungkin berguna dalam menilai waktu arus kas masa depan.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mempermudah pembahasan serta adanya perbandingan dalam penelitian, maka diperlukan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mendukung permasalahan yang coba diungkapkan dalam penelitian ini. juga Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dikemukakan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hermi Sularsih dan Amar Sobir (2019)	Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Peyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kecamatan Lowokwuru	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak menerapkan SAK

		Kota Malang	EMKM, pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk mencatat laporan keuangan mereka
2.	Tatik Amani (2018)	Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa laporan keuangan UD Dua Putri Solehah masih belum disusun sesuai dengan SAK EMKM
3.	Diajeng Amatullah Azizah Richmati (2019)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK EMKM	Penelitian yang dilakukan pada UMKM Batik Jumput Dahlia menunjukkan bahwa tidak adanya laporan keuangan pada UMKM tersebut. UMKM Batik Jumput Dahlia belum mampu menyusun laporannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK EMKM, hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat seluruh aset yang dimiliki.
4.	Natasha Hilarry	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada

	Simajuntak, Tinneke Evie Meggy Sumual, dan Aprili Bacilius (2020)	Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM Restoran Delli Tomohon)	UMKM Restoran Delli Tomohon belum sepenuhnya mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM
5.	Jilma Dewi Ayu Ningtyas (2017)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan	Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belu terdapat adanya laporan keuangan yang dilakukan pada UMKM Bintang Malam yang sesuai dengan SAK EMKM, dimana peneliti menyusun bagaimana sebaiknya laporan keuangan yang benar sesuai SAK EMKM kemudian peneliti juga menemukan keterbatasan bahwa belum adanya Beban pajak, sehingga nila laba bersihnya masih sebelum dikurangi pajak.

Sumber: <https://jurnal.stiegwalisono.ac.id/index.php/JAMSWAP/article/view/115>, <http://ejournal.tbwicalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/266>, <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/2453/1749>, <http://ejournalmapalusunima.ac.id/index.php/jaim/article/view/626/345>, <http://owner.polygon.ac.id/index.php/owner/article/view/28/12>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penulis dalam melakukan penelitian adalah mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM pada UD Siantar Nubian Pematang Siantar yang berada di Dusun II, Desa Totap Majawa, Kec. Tanah Jawa.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data analisis penelitian kualitatif.

Pengertian Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono:

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, bersifat deskriptif, analisis data

secara deduktif, dan lebih menekankan pada makna. Serta peneliti adalah sebagai instrument kunci pada jenis penelitian ini.¹³

Sumber data Pengumpulan data yang disusun dan dilaksanakan dengan cermat akan membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi penelitian.

¹³ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Cetakan ke-19 : CV. Alfabeta, Bandung, 2013, Hal 7.

Menurut Farida Nugrahani bahwa:

Pemahaman mengenai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, kelayakan informasi yang diperoleh¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder.

3.1 Data Primer

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara khusus dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian langsung dari sumber asli”**.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual ataupun kelompok, hasil observasi atau pengamatan pada suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan dan hasil pengujian. Peneliti dengan menggunakan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang ada pada penelitian, karena apabila terdapat data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminasi ataupun dikurangi. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dari pemilik, kebijakan atau perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

¹⁴ Farida Nugrahani, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa**, Surakarta, 2014, hal.108

¹⁵ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen**, Edisi Pertama : BPFE, Yogyakarta, 2018, hal.146

3.2 Data Skunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo menjelaskan bahwa: **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pemilik sumber data, misalnya melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain”**.¹⁶ Sehingga pada penelitian ini penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti melainkan memperoleh data dari sumber yang sudah dibuat orang lain. Adapaun data sekunder yang dikumpulkan adalah transaksi yang terdapat pada perusahaan yang berkaitan dengan perkiraan Neraca, Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

1. Studi kepustakaan

Dimana penelitian yang dilakukan dengan memperoleh informasi melalui buku-buku dan sumber data lain yang ada, dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data melalui buku-buku bacaan serta tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiono mendefenisikan **“wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik**

¹⁶ Ibid, hal. 147

tertentu”¹⁷. Wawancara ini digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Adapun yang diwawancarai adalah pemilik perusahaan tersebut.

3. Dokumentasi

Data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi menurut Sugiono **“dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”¹⁸**.

Dalam hal ini pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada serta catatan-catatan transaksi perusahaan.

4. Observasi

Observasi merupakan suatu cara dalam pengumpulan data dengan mengamati langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan tujuan dapat memahami sebuah fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif penelitian kualitatif ini berupa proses mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis, data atau fenomena yang ada. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data atas transaksi yang terdapat

¹⁷ Sugiono, **Op.Cit.**, hal. 231

¹⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)**, Cetakan ke-21 : Alfabeta, Bandung, 2015

pada UD. Siantar Nubian Pematang Siantar untuk dikelompokkan pada perkiraan Neraca, Laba Rugi, dan CALK, sesuai dengan SAK EMKM.

